



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN KAPUR IX
TAHUN 2021**

Sarilamak, Agustus 2020



SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan

- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
(3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Kapur IX telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing, maka untuk memenuhi kebutuhan diatas kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2021, ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2021 yang berisi informasi tentang program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

MUARO PAITI, Agustus 2020



DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	5
	
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Landasan Hukum	7
	1.3 Maksud dan Tujuan	9
	1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	12
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja KecamatanKapur IX Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kapur IX	12
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....	19
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kapur IX.....	19
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
	
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	29
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kapur IX	32
	3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V	: PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja kec. Kapur IX dan pencapaian renstra s/d tahun 2019	13-15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapur IX	20-20
Tabel 2.3	Revie terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020	23-26
Tabel 2.4	Usulan program dan kegiatan Pemangku kepentingan Tahun 2021	28-28
Tabel 3.1	Program Dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2021	34-36
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 (SIPD Kemendagri)	39-40
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota (e-Planning PusakoPlan)	41-46
Tabel 4.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	47-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2021, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.

I. **Persiapan penyusunan:**

- a. Mengusulkan Nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapur IX tahun 2022

ke Bapelitbang untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

- b. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.

II. Penyusunan Rancangan Awal

Pada awal bulan Juni 2019 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Kapur IX oleh tim penyusun. hasil evaluasi hasil Renja tahun 2018, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2019. Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Kapur IX mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

III. Penyusunan rancangan

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif.

IV. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi Kecamatan Kapur IX dan OPD terkait seperti Bapelitbang, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Koordinasi dilaksanakan pada Bulan Juni 2019.

V. Perumusan rancangan akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Kapur IX.

VI. Penutup

Dalam hal penetapan Renja, Kecamatan Kapur IX melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Rancangan Akhir Kapur IX tahun 2021

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja Pembangunan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 nomor 33).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 202.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja KecamatanKapur IX ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi KecamatanKapur IX.

2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan KecamatanKapur IX.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Renja dan RKA KecamatanKapur IX untuk Tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana KerjaKecamatanKapur IX ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di KecamatanKapur IX.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KecamatanKapur IX pada Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana KerjaKecamatanKapur IX Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan RenjaKecamatanKapur IX, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja KecamatanKapur IX Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra KecamatanKapur IX, analisis kinerja pelayan KecamatanKapur IX, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi KecamatanKapur IX, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang memuat Telaahan terhadap Kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah dan program dan kegiatan.

- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah yang memuat Rencana pendanaan tahun 2021 dan tahun Berencana Maju (2021).
- V. Penutup, yang berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun Laludan Capaian Renstra Kecamatan Kapur IX

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2018 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2019 (Tahun n-1), dengan mengacu kepada APBD Tahun 2019 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2018, dan realisasi Renstra Kecamatan Kapur IX mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan Kecamatan Kapur IX dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Kapur IX. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 tiga kondisi diatas, pada bab ini nantinya dijelaskan faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan,serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kapur IX. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kapur IX sampai dengan triwulan II Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KEC. KAPUR IX DAN PENCAPAIAN
RENSTRA KEC. KAPUR IX S/D TAHUN 2019 (THN BERJALAN)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (n-2)			Target program dan Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2020) (n1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2019 (thn berjalan)					
					Target Renja OPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Pemerintahan													
xx	01	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan teradap pelayanan Administrasi Perkantoran	90	90	90	90	100%	90	189	210%	
xx	01	13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa Surat Menyurat	24	24	12	11	92%	12	44	183%
xx	01	13	01			Jumlah matrai 6.000	1200	0	600	500	83%	600	509	42%
xx	01	13	01			Jumlah Matrai 3.000	120	0	60	50	83%	60	59	49%
xx	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah pembayaran Rekening	24	0	12	11	92%	12	20	83%
xx	01	13	01	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran honorarium dan Tenaga Harian Lepas	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah O/b yang dibayarkan honoronya	11	0	11	11	100%	11	20	182%
xx	01	13	01			Jumlah hari kerja pembayaran THL	504	0	252	231	92%	252	240	48%
xx	01	13	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa Jasa kebersihan Kantor	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah alat kebersihan yang disediakan	2	0	1	1	100%	1	10	500%
xx	01	13	01			Jumlah hari pembayaran honorarium petugas kebersihan	1008	0	252	231	92%	252	240	24%
xx	01	13	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan yang terpenuhi kebutuhan Servis peralatan kantor dalam satu tahun	48	12	12	11	92%	12	32	67%
xx	01	13	01			Rata rata jumlah servis peralatan kantor dalam satu tahun	20	0	12	11	92%	7	20	100%

Renja 2021Kapur IX

xx	01	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi ATK Kantor	24	0	12	11	92%	12	20	83%
xx	01	13	01			Jumlah ATK yang diadakan dalam satu tahun	10	0	4	4	100%	5	13	130%
xx	01	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah lembar cetak	35000	0	19800	19000	96%	15000	19,009	54%
xx	01	13	01			Jumlah Pak penggandaan	45	0	20	15	75%	25	24	53%
xx	01	13	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24	0	12	11	92%	12	20	83%
xx	01	13	01			Jumlah alat listrik yang diadakan dalam satu Tahun	240	0	120	110	92%	100	119	50%
xx	01	13	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah pengisian tabung gas / galon air	220	0	110	100	91%	100	109	50%
xx	01	13	01			Jumlah peralatan yang diadakan	50	0	20	19	95%	20	28	56%
xx	01	13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi makanan dan minuman rapat / tamu	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah porsi makanan dan minuman rapat / tamu yang disediakan	1200	0	600	525	88%	600	534	45%
xx	01	13	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Jumlah o/h yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	4	0	2	1	50%	2	10	250%
xx	01	13	01	20	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan bahan bacaan	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	01			Rata rata pembayaran langgana koran dalam satu tahun	24	0	12	11	92%	12	20	83%
xx	01	13	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran	95	95	95	90	95%	95	95%	1%
xx	01	13	02	10	Pengadaan Mobileur	Jumlah Mobileur yang diadakan	4	2	4	2	50%	0	13	325%
xx	01	13	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang diadakan	3	3	3	3	100%	3	15	500%
xx	01	13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara / servis	8	8	8	7	88%	8	24	300%
xx	01	13	02		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin Aparatur	90	90	90	75	83%	90	174	193%
xx	01	13	02	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang di adakan dalam satu tahun	32	0	0	0	0%	30	9	28%
xx	01	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90	0	100	90	90%	0	99	110%
xx	01	13	05	03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bimbingan Tekhnis yang diselenggarakan dalam satu Tahun	1	0	1	1	100%	0	10	1000%

xx	01	13	06		Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90	90	90	80	89%	90	179	199%
xx	01	13	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun	24	12	12	11	92%	12	32	133%
xx	01	13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	90	90	90	90	100%	90	189	210%
xx	01	13	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Nagari yang menyelenggarakan Pemilihan Wali nagari dalam satu tahun	2	0	2	2	100%	0	11	550%
xx	01	13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	100	100	86	86%	100	195	195%
xx	01	13	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang dalam satu tahun	7	7	7	6	86%	0	22	314%
xx	01	13	23		Program Optimalisasi pemamfaatan Tekhnologi Informasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	100	100	100	100	100%	100	209	209%
xx	01	13	23	06	Penyelenggaraan Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Nagari yang terlayani dalam penyelenggaraan PATEN	7	7	7	7	100%	0	23	329%
xx	01	13	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	100	100	84	84%	100%	193	193%
xx	01	13	24	06	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam satu tahun	118	36	42	35	83%	20	80	68%
xx	01	13	36		Program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan nagari	Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan nagari	100	100	100	100	100%	100%	209	209%
xx	01	13	36	02	Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari	Jumlah Kegiatan Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari dalam satu tahun	4	2	1	1	100%	1	12	300%
xx	01	13	36	03	Patroli Siaga Ketertipan Umum dan Ketentramana Masyarakat	Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun	12	12	12	11	92%	12	32	267%
xx	01	13	36	04	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah bulan yang dipenuhi dalam satu Tahun	12	12	12	11	92%	12	32	267%



CAMAT KAPUR IX
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005

Dari Tabel 2.1 diatas juga dapat dijelaskan hasil evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi pencapaian renstra sampai dengan triwulan II Tahun 2019. Dikarenakan tahun 2019 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan renstra maka pencapaian target program/kegiatan seharusnya telah mencapai kondisi 70%.Berikut dijelaskan program/kegiatan tingkat pencapaiannya *dibawah, sama dan besar* dari 70%,sebagai berikut :

Program yang tidak mencapai target 70% antara lain :

- a. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pencapaiannya 67,14%
- b. Program peningkatan Disiplin pencapaiannya 60%

Faktor yang mempengaruhi program ini tidak mencapai target 70% disebabkan karena Evaluasi tersebut diadakan di triwulan II (dua),sedangkan kegiatan tersebut ada d triwulan III dan IV

Program yang telah mencapai target 70% antara lain :

- a. Program Penyusunan Capaian Laporan Kinerja pencapaiannya 70%

Faktor yang mempengaruhi program ini mencapai target 70% disebabkan karena Evaluasi tersebut diadakan di triwulan II (dua),dan kegiatan tersebut ada d triwulan II tersebut.

Program yang melebihi pencapai target 70% antara lain :

Tidak terdapat program yang melebihi target 70%

Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja ,

Direncanakan target pencapaian sebanyak 12 kali service namun realisasi tercapai hanya 10 kali atau sebanyak 83,4 % hal ini disebabkan kondisi kendaraan yang masih bagus

Kegiatan yang SUDAH mencapai Target yang telah ditetapkan sesuai renstra 2016-2021, hal ini dapat di terangkan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**,direncanakan pengadaan 600 Matrai dan 60 buku cek dan terealisasi sebanyak 100%, dengan tercapainya realisasi tersebut

maka pelayanan administrasi perkantoran di kantor Camat Kapur IX telah terwujud

2. **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik**, direncanakan 24 kali pembayaran rekening listrik/air dan terealisasi sebanyak 100% dengan realisasi 100% tersebut maka penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan dengan baik.
3. **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**, direncanakan pembayaran Honorarium dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 2 orang dan telah tercapai sebanyak 2 orang. dengan tercapainya target di atas maka Jasa Administrasi Keuangan di Kantor Camat Kapur IX telah terwujud
4. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**, direncanakan pembelian 4 paket alat kebersihan dan pembayaran honor 1 orang THL dan telah terealisasi 100% maka kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor telah terwujud
5. **Penyediaan jasa Alat Tulis Kantor**, direncanakan pengadaan 10 paket Alat Tulis Kantor dan telah terrealisasi sebanyak 10 paket atau 100% maka kegiatan penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Camat Kapur IX telah terlaksana dengan baik.
6. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, direncanakan Cetakan 35.000 lembar dan 45 pak dan telah terealisasi sebanyak 100% dengan tercapainya realisasi tersebut maka kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan telah dilaksanakan dengan baik.
7. **Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**, direncanakan pengadaan 240 buah peralatan listrik dan terrealisasi sebanyak 220 buah, dengan tercapainya penyediaan komponen listrik/penerangan Kantor telah dilaksanakan dengan baik sesuai target.
8. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, direncanakan pengisian tabung gas dan galon air sebanyak 210 kali dan telah terrealisasi sebanyak 210 kali atau 100%, dengan tercapainya Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor di Camat Kapur IX terlaksana dengan baik.

9. **Penyediaan makanan dan minuman**, direncanakan pengadaan makanan dan minuman rapat/tamu sebanyak 1200 porsi dan terrealisasi sebanyak 1200 porsi atau 100%, dengan tercapainya target tersebut maka Penyediaan Makanan Dan Minuman telah terwujud.
10. **Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**, direncanakan kegiatan konsultasi keluar daerah/luar provinsi sebanyak 416 kali dan telah terlaksana 416 kali atau 100%, dengan tercapainya target di atas maka kegiatan tersebut telah terwujud.
11. **Penyediaan bahan bacaan**, direncanakan pembayaran langganan koran sebanyak 12 kali dan terlaksana 12 kali atau 100%.
12. **Pengadaan Mebeleur**, direncanakan pengadaan 4 unit **Mebeleur** dan terrealisasi sebanyak 4 unit atau telah terlaksana sebanyak 100 %.
13. **Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor**, direncanakan pemeliharaan 3 unit gedung kantor dan terrealisasi sebanyak 3 unit , dengan terlaksananya hal tersebut maka kegiatan pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor telah terwujud.
14. **Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**, direncanakan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 8 unit dan terrealisasi sebanyak 8 unit.
15. **Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan**, direncanakan jumlah bimbingan tekhnis sebanyak 1 kali dan telah dilaksanakan sebanyak 1 Kali , dengan tercapainya bimtek tersebut maka kegiatan bimtek telah terwujud.
16. **Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD**, direncanakan jumlah penyusunan laporan sebanyak 35 laporan dan telah terrealisasi sebanyak 35 laporan atau 100% maka kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja di Kantor camat Kapur IX telah terwujud.
17. **Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan** , direncanakan 5 kegiatan dan telah terlaksana sebanyak 5 kegiatan atau 100 %

18. **Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa**, direncanakan kegiatan Musrembang di 7 nagari dan telah terlaksana sebanyak 7 nagari di lanjutkan dengan 1 kali Musrembang Kecamatan atau sekitar 114% melebihi dari target yang direncanakan.
19. **Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**, direncanakan di 7 nagari dan telah terlaksana sebanyak 7 nagari atau 100%
20. **Kegiatan Monitoring, Evaluasi ,dan Pelaporan** ,direncanakan melaksanakan monitoring, evaluasi,dan pelaporan sebanyak 118 kali dan telah dilaksanakan sebanyak 118 kali atau 100%, dengan tercapainya kegiatan di atas maka kegiatan itu telah terwujud.
21. **Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari**, direncanakan bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari sebanyak 14 kegiatan dan telah terrealisasi sebanyak 14 kegiatan atau 100% dan telah terwujud.
22. **Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, Raskin dan kegiatan sosial lainnya** ,direncanakan sebanyak 150 kali dan telah dilaksanakan sebanyak 150 kali atau 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Oleh karena Kecamatan Kapur IX bukan bagian dari OPD maka Kecamatan Kapur IX tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KecamatanKapur IX

erdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kapur IX terhadap stakeholdersnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kapur IX;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kapur IX; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021

Kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX pada tahun 2019 sudah cukup optimal,hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dengan adanya PATEN ini di Kecamatan Kapur IX,masyarakat sangat terbantu dibidang pelayanan Selain PATEN Kecamatan Kapur IX juga ada program PADAN yang mana program ini lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayan tanpa harus datang ke Kecamatan untuk pengurusan Administrasi.

2. Pendamping desa,

Dengan adanya Klinik Dana Desa di Kecamatan Kapur IX dapat melayani perangkat Nagari dan pendamping desa dalam berkonsultasi tentang Dana Desa yang ada dilingkup Desa /Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX.

3. Pelaksanaan rapat koordinasi antar instansi di Kecamatan Kapur IX.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka pemecahan masalah maupun penyaluran ide ide demi kemajuan Kapur IX kedepannya,dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas pelayanan di Kecamatan Kapur IX juga dapat turut ditingkatkan.

4. Pemanfaatan media sosial.

Untuk kelancaran komunikasi dengan Nagari-Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX ,pihak Kecamatan menjalin komunikasi melalui Whatsapp group, Face book .

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa adanya kelemahan,antara lain:

1. Belum maksimalnya pelayanan PATEN dikarenakan pelayanan bidang perizinan sebagian masih dilaksanakan di Kabupaten
2. Belum meratanya kualitas pelayanan PADAN di masing-masing Nagari
3. Masih rendahnya pemahaman instansi yang sering mengabaikan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan Kecamatan.
4. Hambatan jaringan internet di beberapa Nagari di Kecamatan Kapur IX yang menghambat informasi dan koordinasi antar Kecamatan dan Nagari.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi d

1. Belum optimalnya penyusunan kebijakkan daerah dan kebijakan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Kapur IX.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2016-2021 yakni meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public dengan tujuannya meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan.

2.3 **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Bab ini berisikan uraian menenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan

serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

Adapun hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Bapelitbang terlihat bahwa tidak ada penambahan dan pengurangan program dan kegiatan hal ini dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut berikut ini :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Kapur IX

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kapur IX	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	70	263,152,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	70	263,152,000	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kapur IX	Tersedianya materai dan buku cek	12 bulan	3,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kapur IX	Tersedianya materai dan buku cek	12 bulan	3,000,000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	22,200,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	12 bulan	22,200,000	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Kapur IX	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan	103,573,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Kapur IX	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan	12 bulan	103,573,000	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,997,500	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,997,500	
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya alat tulis Kantor	12 bulan	25,859,500	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya alat tulis Kantor	12 bulan	25,859,500	
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kapur IX	Tersedianya barang percetakan dan penggandaan	12 bulan	13,924,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kapur IX	Tersedianya barang percetakan dan penggandaan	12 bulan	13,924,000	

8.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	12 bulan	4,833,000	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kapur IX	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	12 bulan	4,833,000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kapur IX	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	15,600,000	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kapur IX	Tersedianya makan dan minum kantor	12 bulan	15,600,000	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kapur IX	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	49,165,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kapur IX	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	49,165,000	
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Kapur IX	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	70	128,776,500	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Kapur IX	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	70	128,776,500	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung Kantor	12 bulan	60,088,500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung Kantor	12 bulan	60,088,500	
6	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2	12 bulan	68,688,000	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas	Kec. Kapur IX	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2	12 bulan	68,688,000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kapur IX	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	78	20,110,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kapur IX	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	78	20,110,000	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Kec. Kapur IX	Terpenuhinya anggaran untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	20,110,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Kec. Kapur IX	Terpenuhinya anggaran untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	20,110,000	
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	55	93,880,000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	55	93,880,000	
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan	12 bulan	93,880,000	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan	12 bulan	93,880,000	

V	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	27,045,000	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	27,045,000	
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Kecamatan	12 bulan	27,045,000	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Musrenbang di tingkat Kecamatan	12 bulan	27,045,000	
V	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI.	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	112,037,000	Program Optimalisasi Pemanfaatan TI.	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	112,037,000	
1	Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	112,037,000	Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).	Kec. Kapur IX	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	112,037,000	
VI	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Kec. Kapur IX	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	67	26,319,000	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Kapur IX	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	67	26,319,000	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	26,319,000	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	12 bulan	26,319,000	
VII	Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	33,568,500	Program Peningkatan Keberdayaan N N Masyarakat Pedesaan	Kec. Kapur IX	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	33,568,500	
1	Bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan pengawasan dana nagari	12 Bulan	11,120,000	Bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan pengawasan dana nagari	12 Bulan	11,120,000	
2	Patroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan Patroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	12 bulan	15,403,500	Patroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan Patroli siaga Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat	12 bulan	15,403,500	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan pengawasan dana nagari	12 Bulan	7,045,000	Bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari	Kec. Kapur IX	Tersedianya kegiatan pengawasan dana nagari	12 Bulan	7,045,000	
	JUMLAH		JUMLAH		704,888,000	JUMLAH				704,888,000	

Muaro Paiti, Agustus 2020

**CAMAT KAPUR IX**
FERRY ARYANTONI, S.STP, M, Si
NIP. 19820216 200012 1 005

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari maupun tingkat Kecamatan. Dalam kesempatan Musrenbang Tahun 2020, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk KecamatanKapur IX. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa KecamatanKapur IX harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius KecamatanKapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan KecamatanKapur IX dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

Taberl 2.4
Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Diantara Tugas pokok dan IKU Kecamatan Kapur IX tahun 2016-2021 adalah :

- I. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX

Bahwa Berdasarkan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Pasal satu menyebutkan Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Kecamatan Kapur IX telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada Bulan Juli 2019 yang hasilnya bernilai 86,4 yang berarti sangat memuaskan. Survei ini dilakukan telah sesuai dengan metode yang ditetapkan pada Permenpan nomor 14 tahun 2017.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kapur IX sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 antara lain:

1. Metode pengumpulan data
 - a. Menyusun kuisisioner yang jumlah unsur maupun instrumen pertanyaan yang disurvei disesuaikan dengan jenis layanan.
 - b. Menentukan jumlah responden sesuai dengan tabel populasi
 2. Pengisian kuisisioner
 - a. Dilakukan oleh petugas unit pelayanan dan hasil dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
 - b. Dilakukan oleh petugas dari unit pelayanan dengan mendatangi dan mewawancarai responden dari rumah ke rumah.
- II. Penerapan Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- Kecamatan dipandang begitu sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan, karena ada banyak masyarakat dari masyarakat itu sendiri yang mengharapkan demikian. Sebenarnya, Kecamatan dapat berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat apabila dilihat kepada kondisi waktu pelayanan yang tepat, kondisi jarak yang dekat, serta kondisi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan itu sendiri.

Oleh karena posisi Kecamatan diberikan begitu strategis maka dalam pelaksanaannya seorang Camat perlu upaya yang optimal untuk lebih aktif

dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dia diharapkan dapat melakukan inovasi. Maksud dari inovasi itu sendiri adalah Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dihasilkan melalui metode pendekatan dalam pelayanan publik. Inovasi yang dilakukan adalah Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

Berdasarkan PERMENDAGRI No4 Tahun 2010 pelayanan administrasi terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat menjadi PATEN adalah penyelenggara pelayanan public di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnyadokumen dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu loket/meja pelayanan. Ruang lingkup dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah pelayanan pada bidang perizinan dan pelayanan pada bidang non perizinan

Dalam menjalankan Program Unggulan yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kapur IX Mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu dengan pelimpahan wewenang tentang Perizinan dan non perizinan.

Untuk menjalankan Program Paten ini Kecamatan Kapur IX Menetapkan Standar pelayanan meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.

Kecamatan Kapur IX telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan Pelayanan yang prima terhadap masyarakat dengan menggunakan anggaran, Sarana/Prasarana serta Personil yang ada. Upaya yang maksimal tersebut diantaranya memanfaatkan Sarana Kominikasi dan Standar Pelayanan yang

dibuat untuk mempermudah dan meringkaskan alur pengurusan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Kapur IX.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021

Selain merupakan penjabaran Renstra KecamatanKapur IX, maka Renja KecamatanKapur IXtahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Agar tercapai target Program dan kegiatan yang direncanakan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Kerja Kecamatan Kapur IX tahun 2021 yang disesuaikan dengan tujuan yang ada di RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, yaitu terdiri dari:

1. Tujuan

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2021 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2010 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX adalah terkait dengan pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Kecamatan Kapur IX erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”**.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Kapur IX terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 8 program prioritas Kecamatan Kapur IX yang dikelompokkan kedalam 4 Urusan , yaitu:

1. Kewilayahan
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Sekretariat
4. Kecamatan

Ringkasan program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ;

TABEL 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KAPUR IX TAHUN 2021

NO	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.1	Kewilayahan	Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

			<p>9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>10. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p>
1.2		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<p>1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</p> <p>2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p>
1.3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Penyediaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
1.4		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<p>2. Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</p>
1.5		Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.1	Pemberdayaan masyarakat Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2.2		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
3.1	Sekretariat	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3.2		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.1	Kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari 2. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

Berdasarkan empat urusan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Kecamatan Kapur IX melaksanakan 10 program dengan 25 kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kapur IX di laksanakan dengan menggunakan Strategi dan Kebijakan yang terintegrasi tidak terpisahkan, Strategi dan kebijakan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Strategi terdiri dari:
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan
 - b. Peningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.
 - c. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pKelayanan publik
 - d. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
 - e. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari
 - f. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.
2. Kebijakan terdiri dari:
 - a. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis
 - b. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .
 - c. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
 - d. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
 - e. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
 - f. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
 - g. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
 - h. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
 - i. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari

- j. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Kapur IX dikelompokkan ke dalam 8 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Rumusan Program dan Kegiatan Kec. Kapur IX pada tahun 2020 serta Perkiraan Maju tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.63.00 KECAMATAN KAPUR IX
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.63.00 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01					KECAMATAN						2,736,429,174	0	
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						2,550,339,331	0	
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan						2,094,083,831	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	2,088,527,831	0	
7 01 01 2.02 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5,556,000	0	
7 01 01 2.03					Administrasi Umum						445,755,500	0	
7 01 01 2.03 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Materai Rp.3.000-Materai Rp.6000	700 Buah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	3,000,000	0	
7 01 01 2.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tagihan rekening Telpn,Air,Listrik dan surat kabar kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	22,200,000	0	
7 01 01 2.03 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Honorarium enam orang tenaga administrasi keuangan dan dua orang Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	97,320,000	0	
7 01 01 2.03 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Honor petugas kebersihan Kantor sebanyak 1 Orang dan jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	26,000,000	0	
7 01 01 2.03 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	9,000,000	0	
7 01 01 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	27,000,000	0	
7 01 01 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	15,000,000	0	
7 01 01 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	6,000,000	0	
7 01 01 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	57,500,000	0	
7 01 01 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	20,000,000	0	
7 01 01 2.03 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terpenuhinya biaya Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	104,166,000	0	
7 01 01 2.03 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tercukupinya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	27,139,500	0	
7 01 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	0	0	
7 01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan nagari	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	12 Bulan	31,430,000	0	
7 01 01 2.04					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10,500,000	0	
7 01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	21 Stel	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	21 Stel	10,500,000	0	
7 01 02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						74,499,500	0	
7 01 02 2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						74,499,500	0	

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	80 .	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 Nagari	Terselenggaranya Pemerintahan dan pelayananan Publik di Kec. Kapur IX	7 Nagari	74,499,500	0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															71,532,881	0		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa															71,532,881	0		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penguatan nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	100 %	terlaksananya musyawarah pembangunan desa/nagari dan kecamatan	7 Nagari	Terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan di Kapur IX	12 Bulan	4,802,500	0		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penguatan nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	100 %	Persentase peningkatan keberdayaan pedesaan	7 Nagari	Terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan di Kapur IX	12 Bulan	66,730,381	0		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															40,057,461	0		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															40,057,461	0		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Penguatan ekonomi kerakyatan Penguatan nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	Terpenuhinya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	7 Nagari	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	12 Bulan	24,328,000	0		
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Penguatan nagari Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	Adanya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	7 Nagari	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	12 Bulan	12,394,800	0		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan nagari Penguatan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	Terpenuhinya kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 Bulan	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	12 Bulan	23,014,000	0		
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penguatan ekonomi kerakyatan Penguatan nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	Persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	Terpenuhinya kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial lainnya	12 Bulan	Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	12 Bulan	20,378,123	0		

MUARU PAITI, Agustus 2020

CAMAT KAPUR IX



FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan Administrasi perkantoran		90%	387,186,000.00				437,500,000.00
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi 6000 dan 3000,buku cek		700 materi dan 40 buku cek	3,000,000.00			700 materi dan 40 buku cek	5,000,000.00
	Jumlah materi dan buku cek yang dibutuhkan dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	700 Buah	3,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		5,000,000.00
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening ar,istrk, serta pulsa dalam satu tahun		Pembayaran rekening listrik,air,pusa sebanyak 12 kali	22,200,000.00			Pembayaran rekening listrik,air,pusa sebanyak 12 kali	30,000,000.00
	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, dan pulsa dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	12 Kali	22,200,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honorarium administrasi keuangan dan tenaga haran lepas		Pembayaran honorarium 6 orang tenaga administrasi keuangan dan 2 orang tenaga harian lepas	97,320,000.00			Pembayaran honorarium 6 orang tenaga administrasi keuangan dan 2 orang tenaga harian lepas	115,000,000.00
	Jumlah pembayaran honorarium administrasi keuangan dan THL		Kantor Camat Kapur IX	8 Orang	97,320,000.00	APBDKAB	IKU OPD		115,000,000.00
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor		12 Kali	26,000,000.00			12 Kali	30,000,000.00
	Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor		Kantor Camat Kapur IX	12 Kali	26,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		30,000,000.00
0.00.00.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang terpenuhi kebutuhan servis ,laptop,genset,dll dalam satu tahun		9 Buah Laptop,8 buah Printer serta 2 Genset	9,000,000.00			9 Buah Laptop,8 buah Printer serta 2 Genset	10,000,000.00

Renja 2021Kapur IX

	Jumlah peralatan yang terpenuhi kebutuhan servis(laptop,PC, Genset,dll)		Kantor Camat Kapur IX	19 Buah	9,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang terpenuhi untuk kebutuhan alat tulis kantor		12 Bulan	27,000,000.00			12 Bulan	28,000,000.00
	Jumlah ATK yang terpenuhi dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	120 rim	27,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		28,000,000.00
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang terpenuhi dalam satu tahun		22.880 fhto copy,50 jilid dokumen	15,000,000.00			22.880 fhto copy,50	16,000,000.00

Renja 2021	Kapur IX	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									jilid dokumen	
		Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi		Kantor Camat Kapur IX	22880 Lembar	15,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		16,000,000.00
0.00.00.01.12.		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun		40 buah lampu,39 meter kabel	6,000,000.00			40 buah lampu,39 meter kabel	7,500,000.00
		Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	40 Buah	6,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,500,000.00
0.00.00.01.13.		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan Kantor yang terpenuhi jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun		11 Buah	57,500,000.00			11 Buah	62,000,000.00
		Jumlah peralatan Kantor yang terpenuhi jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	11 Buah	57,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		62,000,000.00
0.00.00.01.17.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan / minum rapat/ tamu yang disediakan dalam satu tahun		1200 porsi makan,120 kotak air mineral	20,000,000.00			1200 porsi makan,120 kotak air mineral	24,000,000.00
		Jumlah porsi makan dan minum rapat/tamu yang disediakan		Kantor Camat Kapur IX	1200 Porsi	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		24,000,000.00
0.00.00.01.18.		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi dalam satu tahun		115kali dalam daerah,3 kali luar daerah luar privinsi	104,166,000.00			115kali dalam daerah,3 kali luar daerah luar privinsi	110,000,000.00
		Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	115 Kali	104,166,000.00	APBDKAB	IKU OPD		110,000,000.00
0.00.00.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantran		95%	58,569,500.00				110,000,000.00
0.00.00.02.05.		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinasoperasional yang diadakan dalam satu tahun		4 Unit roda dua	27,139,500.00			2 Unit Kendaraan dinas roda dua	
		Jumlah kendaran dinas operasional yang diadakan		Kantor Camat Kapur IX	1 Unit	27,139,500.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.02.22.		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dalam satu tahun		3 Buah gedung	0.00			3 Buah gedung	30,000,000.00
		Jumlah gedung Kantor yang diadakan		Kantor Camat Kapur IX	3 Buah	0.00	APBDKAB	IKU OPD		30,000,000.00
0.00.00.02.24.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihar/servis dalam satu tahun		1 Unit roda 4,8 unit roda 2	31,430,000.00			1 Unit roda 4,8 unit roda 2	80,000,000.00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihar / diservis		Kantor Camat Kapur IX	8 Unit	31,430,000.00	APBDKAB	IKU OPD		80,000,000.00
0.00.00.03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur		90%	10,500,000.00				0.00
0.00.00.03.02.		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan dalam satu tahun		40 stel	10,500,000.00			-	0.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAPUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	21 Stel	10,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		90%	0.00				0.00
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan dalam satu tahun		1 Kali	0.00			1 Kali	0.00
	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diselenggarakan dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	1 Kegiatan	0.00	APBDKAB	IKU OPD		0.00
0.00.00.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan dalam satu Tahun		1 Kali	0.00			1 Kali	0.00
	Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	1 Kegiatan	0.00	APBDKAB	RUTIN OPD		0.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		90%	5,556,000.00				7,500,000.00
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dikirim dalam satu tahun		30 laporan	5,556,000.00			30 laporan	7,500,000.00
	Jumlah laporan yang dikirim dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	30 Laporan	5,556,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,500,000.00
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif		90%	66,730,381.00				80,000,000.00
1.02.07.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Nagari yang menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari dalam satu Tahun		2 Nagari	66,730,381.00			2 Nagari	80,000,000.00
	Jumlah porsi makan dan minum acara pemberdayaan masyarakat serta perjalanan dinas dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	145 Kali	66,730,381.00	APBDKAB	IKU OPD		80,000,000.00
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Nagari Yang Berstatus Berkembang dan Maju		7 Nagari	4,802,500.00				10,000,000.00
1.02.07.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Nagari yang melaksanakan musrenbang dalam satu Tahun		7 Nagari	4,802,500.00			7 Nagari	10,000,000.00
	Jumlah nagari yang melaksanakan musrenbang dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	7 Nagari	4,802,500.00	APBDKAB	IKU OPD		10,000,000.00
4.00.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		100%	74,499,500.00				75,000,000.00
4.00.01.23.06.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Nagari yang terlayani dalam penyelenggaraan Paten		7 Nagari	74,499,500.00			7 Nagari	75,000,000.00
	Jumlah Nagari yang terlayani dalam penyelenggaraan PATEN		Kantor Camat Kapur IX	7 Nagari	74,499,500.00	APBDKAB	IKU OPD		75,000,000.00
4.00.01.24.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase peningkatan menintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		100%	6,197,400.00				42,000,000.00
4.00.01.24.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam satu tahun		118 kali	6,197,400.00			118 Kali.	42,000,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAPUR

	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	118 Kali	6,197,400.00	APBDKAB	RUTIN OPD		42,000,000.00
--	--	--	-----------------------	----------	--------------	---------	-----------	--	---------------

K

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.00.01.36.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Tepat Waktu		100%	33,860,061.40				53,500,000.00
5.00.01.36.02.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Jumlah kegiatan bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari dalam satu tahun		1 kegiatan ,73 kali SPPD dalam daerah	12,164,000.00			1 kegiatan ,73 kali SPPD dalam daerah	20,000,000.00
	Jumlah kegiatan bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	1 Kegiatan	12,164,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		20,000,000.00
5.00.01.36.03.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah kegiatan tramtib yang diadakan serta perjalanan dinas yang terpenuhi dalam satu tahun		1 keg,45 SPPD dalam daerah	11,507,000.00			1 keg,45 SPPD dalam daerah	21,000,000.00
	Jumlah kegiatan tramtib yang diadakan serta perjalanan dinas yang terpenuhi dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	1 Kegiatan	11,507,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		21,000,000.00
5.00.01.36.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta perjalanan dinas dalam satu tahun		1keg,85 kali SPPD dalam daerah	10,189,061.40			1keg,85 kali SPPD dalam daerah	12,500,000.00
	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diadakan serta perjalanan dinas yang dipenuhi dalam satu tahun		Kantor Camat Kapur IX	1 Kegiatan	10,189,061.40	APBDKAB	RUTIN OPD		12,500,000.00
TOTAL					647,901,342.40				815,500,000.00

Rencana Tahun					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Thn. 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					Urusan Pemerintahan								
xx	01	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan teradap pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kapur IX	90%	382.500.000	Apbd Kab		90%	361.500.000
xx	01	13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah matri 6.000 dan Matri 3.000	Kec. Kapur IX	700 Matri dan 40 Buku cek			Rutinitas Opd	700 Matri dan 40 Buku cek	
xx	01	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan dalam pembayaran Rekening air, listrik sera Pulsa dalam tahun .	Kec. Kapur IX	12 Bln	30.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	12 Bln	30.000.000
xx	01	13	01	07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pembayaran honorarium Administrasi Keuangan dan Tenaga Harian Lepas	Kec. Kapur IX	12 Bln	115.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	12 Bln	115.000.000
xx	01	13	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah bulan dalam satu tahun yang terpenuhi dalam pelaksanaan kebersihan Kantor	Kec. Kapur IX	12 Bln	30.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	12 Bln	30.000.000
xx	01	13	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang terpenuhi kebutuhan Servis Laptop, PC, Genset dan lain lain dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	9 Bh Laptop, 8 bh Printer serta 2 Genset	10.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	9 Bh Laptop, 8 bh Printer serta 2 Genset	10.000.000
xx	01	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan yang dipenuhi untuk kebutuhan Alat tulis kantor	Kec. Kapur IX	12 Bln	28.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	12 Bln	28.000.000
xx	01	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan Jumlah Pak Penggandaan dalam satu tahun yang terpenuhi .	Kec. Kapur IX	22.880 Phot Copy serta 50 Jilid Dokumen	16.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	22.880 Phot Copy serta 50 Jilid Dokumen	16.000.000
xx	01	13	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik dalam satu tahun yang terpenuhi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Kapur IX	40 Bh lampu serta 39 m Kabel	7.500.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	40 Bh lampu serta 39 m Kabel	7.500.000
xx	01	13	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpenuhi Jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	5 Bh almari, 2 laptop serta 2 PC dan 2 bh printer	62.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	5 Bh almari, 2 laptop dan 2 bh printer	41.000.000
xx	01	13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman rapat / tamu yang disediakan	Kec. Kapur IX	1200 Porsi makan dan 120 Kotak air mineral	24.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1200 Porsi makan dan 120 Kotak air mineral	24.000.000
xx	01	13	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dikuti dalam satu tahun yang terpenuhi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Kapur IX	115 Kali dalam daerah dan 3 Kali Luar daerah luar provinsi	60.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	115 Kali dalam daerah dan 3 Kali Luar daerah luar provinsi	60.000.000

xx	01	13	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Kapur IX	95%	225.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD	95%	190.000.000
xx	01	13	02	10	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	4 Bh Kendaraan dinas roda dua	70.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD	2 Bh Kendaraan dinas roda dua	35.000.000
xx	01	13	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang diadakan perbaikan dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	3 Bh Gedung	75.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD	3 Bh Gedung	75.000.000
xx	01	13	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara / servis dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	1 Bh Kendaraan dinas roda 4 dan 8 Bh Roda 2.	80.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD	1 Bh Kendaraan dinas roda 4 dan 8 Bh Roda 2.	80.000.000
xx	01	13	02		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Tingkat disiplin Aparatur	Kec. Kapur IX	90%	20.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD	90%	-
xx	01	13	02	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	40 Stel	20.000.000	Apbd Kab	Mendukung Keg. OPD		-
xx	01	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Kapur IX	90%	25.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	90%	25.000.000
xx	01	13	05	03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diselenggarakan dalam satu Tahun	Kec. Kapur IX	1 Kegiatan	20.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1 Kegiatan	20.000.000
xx	01	13	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diselenggarakan dalam satu Tahun	Kec. Kapur IX	1 Kegiatan	5.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1 Kegiatan	5.000.000
xx	01	13	06		Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Kapur IX	90%	35.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	90%	35.000.000
xx	01	13	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dikirimkan dalam satu Tahun	Kec. Kapur IX	30 Laporan	35.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	30 Laporan	35.000.000
xx	01	13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec. Kapur IX	90	80.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	90	80.000.000
xx	01	13	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Jumlah Porsi makan dan minum acara pemberdayaan masyarakat serta perjalanan dinas dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	5 Porsi makan serta 145 SPPD dalam daerah	80.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	5 Porsi makan serta 145 SPPD dalam daerah	80.000.000

xx	01	13	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Kec. Kapur IX	100%	30.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	100%	30.000.000
xx	01	13	17	02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	7 Nagari	30.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	7 Nagari	30.000.000
xx	01	13	23		Program Optimalisasi pemamfaatan Teknologi Informasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Kec. Kapur IX	100%	112.000.000	Apbd Kab	Prioritas kegiatan Opd	100%	112.000.000
xx	01	13	23	06	Penyelenggaraan Pelayanan Admisitrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Nagari yang terlayani dalam penyelenggaraan PATEN	Kec. Kapur IX	7 Nagari	112.000.000	Apbd Kab	Prioritas kegiatan Opd	7 Nagari	112.000.000
xx	01	13	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Kapur IX	100%	42.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	100%	42.000.000
xx	01	13	24	06	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	118 Perjalanan	42.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	118 Perjalanan	42.000.000
xx	01	13	36		Program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan nagari	Persentase Peningkatan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan nagari	Kec. Kapur IX	100%	53.500.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	100%	53.500.000
xx	01	13	36	02	Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari	Jumlah Kegiatan Bimbingan supervisi dan Pengawasan dana nagari dalam satu tahun	Kec. Kapur IX	1 Kegiatan , 73 kali sppd dalam daerah	20.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1 Kegiatan , 73 kali sppd dalam daerah	20.000.000
xx	01	13	36	03	Patroli Siaga Ketertipan Umum dan Ketentramana Masyarakat	Jumlah Kegiatan Trantib yang diadakan serta perjalanan dinas yang dipenuhi dalam satu Tahun	Kec. Kapur IX	1 Kegiatan , 45 kali sppd dalam daerah	21.000.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1 Kegiatan , 45 kali sppd dalam daerah	21.000.000
xx	01	13	36	04	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang diadakan serta perjalanan dinas yang dipenuhi dalam satu Tahun	Kec. Kapur IX	1 Kegiatan , 85b kali sppd dalam daerah	12.500.000	Apbd Kab	Rutinitas Opd	1 Kegiatan , 85b kali sppd dalam daerah	12.500.000
JUMLAH									1.010.000.000				929.000.000

Muaro Paiti, 21 Agustus 2020

CAMAT KAPUR IX

FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Disamping itu, acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 adalah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX Tahun 2016-2021.

Renja Kecamatan Kapur IX memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Berhasil tidaknya pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Kapur IX. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Kapur IX, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Kapur IX dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2019, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Muaro Paiti, 21 Agustus 2020

**CAMAT KAPUR IX**
FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si
NIP. 19820216 200012 1 005



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005/2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor

80);

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;
 - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan Pengarah melalui Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 08 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 285 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-
OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota

	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota

	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota

	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota

	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota

	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua

	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota

	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota

	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota

	Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota

	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	

	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota

	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota

	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Holtikultura	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris

	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan	Anggota

	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota

	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota

27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota

	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Hal Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota

	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguk	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	

	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota

	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 08 November 2019

